

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi yang signifikan di era ini telah mempermudah transaksi finansial (Hasanah et al., 2023), implementasi pembayaran non-tunai berbasis *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) telah banyak diterapkan di berbagai sektor, termasuk pada layanan parkir. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan QRIS memberikan dampak positif terhadap efisiensi transaksi dan peningkatan pendapatan retribusi, seperti yang terlihat pada studi di pasar tradisional di Makassar (Yuvita & Abdul, 2023) dan sistem e-parkir berbasis teknologi hybrid di beberapa kota (Fauzi et al., 2022). Namun, meskipun berbagai kajian telah membahas efektivitas implementasi dan faktor-faktor teknis dari sistem ini, respons dari target kebijakan, terutama penerimaan pengguna terhadap pembayaran non-tunai QRIS, masih memerlukan pendalaman lebih lanjut (AR & Andarwati, 2024; Afriani & Karim, 2024).

Penelitian ini berupaya melanjutkan rekomendasi-rekomendasi dari studi sebelumnya dengan menitikberatkan pada analisis respons target kebijakan yang fokusnya adalah untuk memahami sejauh mana penerimaan pengguna terhadap sistem ini, strategi yang dapat dikembangkan ke depannya, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan QRIS sebagai metode pembayaran retribusi parkir.

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 dan 2022 pada Retribusi Pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum, sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah pada Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Tanjungpinang Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Jasa Umum				
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3.000.000.000,00	1.687.601.000,00	56,25	1.419.322.000,00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), 2023)

Pada Tabel diatas menunjukkan Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Tanjungpinang menetapkan anggaran retribusi parkir ditepi jalan umum sebesar Rp3.000.000.000,- Namun, realisasi pendapatan hanya mencapai Rp1.687.601.000,- atau sekitar 56,25% dari target yang telah ditetapkan. Ada perbedaan yang cukup besar antara tujuan dan realisasi pendapatan, seperti yang ditunjukkan oleh pencapaian ini. Dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun 2022 sebesar Rp1.419.322.000,- terdapat peningkatan sebesar Rp268.279.000,- atau sekitar 18,89%. Meskipun ada peningkatan, persentase pencapaian terhadap target tetap rendah karena target anggaran yang lebih tinggi pada tahun 2023.

Ada beberapa alasan mengapa layanan parkir tepi jalan umum ini menghasilkan jumlah pendapatan yang rendah. Salah satunya adalah target yang ditetapkan terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan pendapatan yang sebenarnya. Selain itu, ada banyak lokasi parkir yang tidak beroperasi atau telah ditutup. Maka, perlunya pendekatan baru dalam sistem pembayaran retribusi parkir yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), 2023).

Pemerintah Kota Tanjungpinang telah mengadopsi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai solusi inovatif yang akan digunakan sebagai alternatif pembayaran retribusi parkir hingga akhir tahun 2023. Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang No. 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Transaksi Non Tunai di Lingkungan Kota Tanjungpinang, Pasal 7 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah. Pemerintah kini memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan layanan publik, termasuk dalam pembayaran parkir (Calcabilla & Dyastari, 2023). Ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dan juga dapat mencegah adanya kebocoran serta ketidaktransparanan hasil pada PAD. Dikarenakan juru parkir akan mentransfer pembayaran tunai ke kas daerah dengan memindai rekening uang elektronik mereka sendiri (Karim et al., 2022).

Dari sudut pandang yang lebih luas, implementasi QRIS juga memberikan keuntungan bagi negara dan pemerintah daerah. Bagi pemerintah pusat, kebijakan ini mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang bertujuan memperluas inklusi keuangan serta memperkuat infrastruktur digital nasional. Pencatatan transaksi secara digital mempermudah pemantauan arus uang, meningkatkan potensi penerimaan pajak, serta mengurangi praktik ekonomi informal yang sulit dijangkau melalui sistem keuangan konvensional. Sementara itu, bagi pemerintah daerah, penggunaan QRIS membantu menciptakan sistem keuangan yang lebih rapi dan terbuka. Dengan sistem non-tunai ini, uang retribusi parkir bisa langsung masuk ke kas daerah tanpa harus dipegang dulu oleh petugas, sehingga lebih cepat dan kecil kemungkinan terjadi kecurangan atau kehilangan uang. Selain itu, sistem

QRIS juga memudahkan pemerintah dalam memantau jumlah retribusi parkir yang masuk setiap harinya secara otomatis melalui sistem. Ini membuat pengawasan dan perencanaan keuangan daerah menjadi lebih mudah dan akurat.

QRIS merupakan standar kode respons cepat yang dirancang untuk memfasilitasi berbagai jenis transaksi pembayaran digital. Menurut Sholihah & Nurhapsari (2023), QRIS berfungsi sebagai platform terintegrasi yang menyatukan berbagai macam kode QR untuk memungkinkan proses pembayaran yang cepat, mudah, ekonomis, aman, dan terpercaya. Implementasi QRIS dalam konteks pembayaran retribusi parkir dapat dianggap sebagai terobosan teknologi yang revolusioner. Inovasi ini membawa potensi transformatif dalam meningkatkan efisiensi operasional sistem parkir, mengurangi waktu transaksi, dan meminimalkan kesalahan manual yang sering terjadi dalam sistem pembayaran konvensional. Lebih dari sekadar efisiensi, penerapan QRIS dalam pembayaran retribusi parkir juga berkontribusi pada peningkatan transparansi transaksi keuangan. Sistem digital ini memungkinkan pencatatan yang akurat, jejak audit yang jelas, dan pengurangan risiko manipulasi atau penyalahgunaan dalam pengelolaan dana retribusi, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang lebih akuntabel dan profesional. Kemungkinan positif dari penerapan QRIS ini cukup besar, mengingat pengurangan kebocoran pendapatan dan peningkatan kecepatan transaksi yang diharapkan dapat meningkatkan PAD secara substansial.

Adapun terdapat 10 Titik prioritas sebagai percontohan Retribusi Parkir Non Tunai dengan menggunakan Qris di Kota Tanjungpinang (Memokepri) yaitu diantaranya :

1. Restoran Manabu : Jalan Sudirman, jl Hangtuh No 17 Sadap, Tepi Laut
2. Rumah Makan Mr. Blitz : Jalan Basuki Rahmat, Kp Baru
3. Coolercity (Es krim) : Jalan Ir Sutami, No 7
4. Pizza Hut : Jalan Ketapang, No 3
5. Rumah Makan Sodang Rembulan : Jalan Wr Supratman, No. 99, Km 8 atas
6. Tema Kopi : Jalan RH Fisabilillah, Km 8 atas
7. Ouca Ice Cream : Jalan RH Fisabilillah Sebrang SPBU Batu 8 atas
8. Ouca Ice Cream : Jalan Adi Sucipto
9. Rumah Makan Mbah Darmo : Jalan Raya Tanjung Uban, Km 11
10. Momoyo : Jalan DI Panjaitan, di Depan Swalayan Pinang Lestari

Meskipun QRIS sudah diperkenalkan sebagai metode pembayaran retribusi parkir, tingkat adopsi kalangan pengguna parkir masih rendah. Banyak pengguna yang tetap memilih membayar secara tunai atau bahkan enggan melakukan pembayaran digital dikarenakan mungkin merasa terbiasa dengan transaksi tunai. Tidak hanya itu sosialisasi yang terbatas atau kurang efektif menyebabkan banyak masyarakat belum mengetahui adanya sistem metode pembayaran QRIS pada parkir. Selain masyarakat, penerapan QRIS ini mendapatkan berbagai pendapat pro dan kontra dari juru parkir. Sebelum sistem non-tunai diterapkan, pembagian pendapatan parkir biasanya dilakukan langsung antara pengguna parkir dan petugas parkir. Dengan adanya sistem QRIS, pembayaran dilakukan secara elektronik, dan pembagian hasil bisa menjadi lebih rumit. Beberapa juru parkir khawatir bahwa sistem ini dapat mengurangi penghasilan mereka karena pembayaran langsung dari pengguna parkir bisa terlewatkan atau kurang transparan. Di sisi lain, ada juga

petugas parkir yang mendukung kebijakan ini karena dianggap sebagai langkah positif menuju transaksi yang lebih aman dan transparan. Pembayaran non-tunai juga membantu mengurangi risiko pencurian dan masalah dalam menghitung uang tunai. Tantangan ini mencerminkan dinamika yang lebih besar dalam transformasi digital di Indonesia, di mana efisiensi teknologi bertemu dengan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat.

Penelitian tentang pelaksanaan sistem QRIS oleh Calcabilla & Dyastari (2023) menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menerapkan inovasi kebijakan pembayaran parkir non-tunai QRIS di beberapa wilayah, termasuk Kota Samarinda. Parkir elektronik, juga dikenal sebagai e-parkir, di Samarinda tidak bekerja dengan baik karena prosedurnya tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk mengevaluasi seberapa efektif implementasi inovasi sistem parkir elektronik (Calcabilla, 2023).

Dalam konteks modernisasi layanan pembayaran, keberhasilan implementasi sistem pembayaran Non-tunai QRIS ini sangat bergantung pada respons dan penerimaan dari pihak-pihak terkait, yaitu petugas parkir dan pengguna jasa. Petugas parkir sebagai pelaksana di lapangan harus menyesuaikan diri dengan teknologi baru, yang seringkali membutuhkan pelatihan tambahan dan adaptasi tertentu. Pada penelitian Prabandari, Pandawani, & Maba (2023) mengemukakan bahwa efektivitas penggunaan QRIS di daerah Gianyar masih perlu ditingkatkan, terutama dari sisi edukasi terhadap petugas parkir tentang teknologi tersebut. Dengan adaptasi yang tepat dari kedua pihak, potensi manfaat dari sistem QRIS dapat dimaksimalkan di Tanjungpinang, memberikan kemudahan serta efisiensi

dalam transaksi parkir (Prabandari 2023).

Selain itu, respon positif dari target kebijakan terhadap penerapan QRIS tidak hanya bergantung pada pendidikan tetapi juga pada manfaat yang dirasakan dan kemudahan penggunaan. Penelitian Afriani & Karim (2024) menunjukkan bahwa persepsi kegunaan dan kenyamanan berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat menggunakan QRIS untuk parkir di Mataram. Hal ini tentunya sejalan dengan penelitian Safitri (2024) yang menjelaskan bahwa implementasi oleh Dinas Perhubungan di Surabaya menunjukkan perbaikan signifikan dalam hal kemudahan bagi masyarakat setelah pengenalan QRIS. Oleh karenanya, untuk meningkatkan penerimaan di Tanjungpinang, diperlukan strategi sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat dan petugas parkir mengenai manfaat dan kemudahan penggunaan QRIS.

Implementasi pembayaran non-tunai QRIS di Kota Tanjungpinang memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana target kebijakan, yaitu petugas parkir dan pengguna jasa, merespons dan menerima sistem baru ini. Respons dari para target kebijakan ini merupakan indikator penting keberhasilan implementasi sistem pembayaran non-tunai. Menurut penelitian Abdillah, Muhammad Farrel, & M. Noer Falaq Al Amin (2024) di Surabaya, penerapan kebijakan pembayaran parkir elektronik yang tidak ditangani dengan baik dapat mengakibatkan resistensi di antara pengguna parkir. Pada penelitian Sriekaningsih, Stie, Tarakan, Riyanto, & Prakasa (2022) juga menyoroti bahwa pemahaman masyarakat akan penggunaan QRIS berperan penting dalam menentukan tingkat penerimaan. Oleh sebab itu, yang menjadi tantangan utama dalam implementasi adalah memastikan bahwa

target kebijakan memahami manfaat dan kemudahan yang ditawarkan teknologi QRIS ini. Di Kota Tanjungpinang, kesiapan dan respons positif dari petugas parkir dan pengguna jasa terhadap QRIS akan sangat menentukan efektivitas dan efisiensi sistem baru ini.

Sebagian besar penelitian-penelitian sebelumnya dilakukan di Kota-kota besar, belum ada yang spesifik yang mengkaji di Kota Tanjungpinang. Kemudian fokus penelitian sebagian besar membahas implementasi kebijakan secara umum dan inovasi teknologi pembayaran qris belum ada yang spesifik menganalisis respon target kebijakan serta pelaksana kebijakan.

Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji tentang bagaimana respons target kebijakan, yakni petugas parkir dan pengguna jasa serta pelaksana kebijakan, terhadap implementasi pembayaran retribusi parkir non-tunai melalui sistem *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) di Kota Tanjungpinang. Fokus kajian ini adalah untuk memahami bagaimana target kebijakan (Petugas parkir dan pengguna jasa) serta pelaksana kebijakan beradaptasi dengan sistem pembayaran terbaru ini serta mengidentifikasi kendala yang mereka alami baik pengguna jasa layanan parkir maupun petugas parkir. Maka dari itu penelitian ini perlu dilakukan agar mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai respon target kebijakan, sehingga nantinya bisa menjadi dasar perbaikan pengembangan lebih lanjut dalam implementasi QRIS di Kota Tanjungpinang. Hasil analisis ini nantinya berkontribusi pada pengembangan intervensi yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang

berjudul ”Analisis Respons Target Kebijakan terhadap Pembayaran Retribusi Parkir Non-Tunai QRIS di Kota Tanjungpinang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, masalah yang hendak ditelaah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana respons target kebijakan terhadap pembayaran retribusi parkir non-tunai QRIS di Kota Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis bagaimana Respon Target kebijakan terhadap sistem Transaksi Non-Tunai melalui penerapan QRIS dalam pembayaran retribusi parkir di Kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi teoritis mengenai pemahaman lebih dalam tentang bagaimana masyarakat merespons kebijakan digitalisasi dalam sektor parkir, baik dari sisi pengelola parkir maupun pengguna jasa layanan parkir.
- b. Memperkaya literatur tentang implementasi kebijakan pembayaran non-tunai, khususnya dalam konteks kota-kota kecil atau daerah yang sedang berkembang.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis: Kajian ini menjadi kesempatan bagi penulis untuk mempelajari proses analisis permasalahan sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan, terutama

terkait dengan respon target kebijakan terhadap implementasi sistem pembayaran QRIS di Kota Tanjungpinang.

- b. Bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang: Hasil daripada penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah dalam meningkatkan implementasi sistem pembayaran parkir non-tunai QRIS di Kota Tanjungpinang.
- c. Bagi Akademik: Penelitian ini tentunya diharapkan dapat memperkaya literatur dan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya

